

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xv
DAFTAR PUTUSAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Tipe penelitian hukum.....	7
1.5.2 Pendekatan (Approach).....	8
1.5.3 Sumber Bahan hukum (Legal Sources).....	10
1.5.4 Prosedur pengumpulan bahan hukum	11
1.5.5 Analisis Bahan Hukum	11
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis.....	12

BAB II KEBERLAKUAN ASAS PREFERENSI HUKUM ANTARA HUKUM PAJAK DAN HUKUM KEPAILITAN DALAM HAL PENAGIHAN UTANG PAJAK WAJIB PAJAK YANG DIPAILITKAN	13
2.1 Prosedur Penagihan Pajak yang Berlaku di Indonesia	13
2.2 Sistem Kepailitan yang Berlaku di Indonesia	21
2.3 Akibat Hukum Kepailitan	28
2.4 Keterkaitan Hukum Kepailitan dengan Hukum Pajak dalam Penagihan Utang Pajak Terhadap Wajib Pajak yang Diputus Pailit	34
2.4.1 Ketentuan Khusus Perpajakan dalam Hal Perwakilan Wajib Pajak yang Dinyatakan Pailit	34
2.4.2 Status Pailit dan Kaitannya dengan Pertanggungjawaban Pidana Pajak.....	36
2.4.3 Asas Preferensi yang Berlaku dalam Kasus ini	40
BAB III UPAYA PENAGIHAN UTANG PAJAK OLEH PEMERINTAH TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DIPAILITKAN.....	50
3.1 Hak Mendahului Negara atas Utang Pajak.....	50
3.2 Prosedur Penagihan Utang Pajak terhadap Wajib Pajak yang Telah Diputus Pailit.....	55
3.2.1 Kewenangan Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit.....	55
3.2.2 Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Pasca Putusan Pailit	60

3.2.3	Upaya Hukum Keberatan DJP Bila Apabila Merasa Dirugikan.....	71
3.3	Kajian Kasus Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Putusan Perdata Nomor 750/Pdt.G/2019/PN.DPS	77
BAB IV PENUTUP		90
4.1	Kesimpulan.....	90
4.2	Saran.....	91
DAFTAR BACAAN.....		92

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2000 Tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Seketika dan Sekaligus

DAFTAR PUTUSAN

1. Putusan Pailit Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2017, antara I GEDE AGUS HARDIAWAN terhadap MEGA SARI dan NI KETUT MURNI
2. Putusan Pra Peradilan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 19/Pid.Pra/2018/PN.Dps antara I GEDE AGUS HARDIAWAN melawan DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANWIL BALI
3. Putusan Perdata Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 750/Pdt.G/2019/PN.DPS antara I GEDE AGUS HARDIAWAN melawan DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (DJP) BALI DAN KAWAN-KAWAN
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013